

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2017-2020

Oleh

Eliana¹, Intan Novia Astuti², Fara Ivana³, Indra Kesuma⁴, Sisca Mediyanti⁵, Dedek Rodhatul Jannah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh
Jalan Prada Utama No.15, Banda Aceh 23116 Telp.06513618778

e-mail: ¹elianajl843@gmail.com, ²intann@stiesabang.ac.id, ³Farah@stiesabang.ac.id,
⁴Indra@stiesabang.ac.id, ⁵sisca@stiesabang.ac.id, ⁶dedek@stiesabang.ac.id

Abstract

The study aims to determine the influence of Regional Real Income (RNR), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Funds (SDF), and Profit Fund (DBH) on capital purchases in the district/province city of Aceh in 2017-2020. The population in the study is 23 districts/cities in the province of Aceh. The sample total in this study is 92 observation data obtained from the total population of 23 district/city multiplied by the number of observation years of 4 years with total sampling or census techniques. This research data is secondary data, which is data obtained from the official website of the Central Statistical Agency (BPS) Aceh. The data analysis technique used is a method of double linear regression analysis. The results of this study showed that simultaneously Regional Real Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Profit Fund (DBH) had significant positive impact on Capital Shopping in the district/province city of Aceh. The partial tests show that the General Allocation Fund (GAU) had a significant positive effect on Capital shopping, Special Allocations Fund (SAD), and Outcome Fund (DFH) did not have a negative impact on capital shopping, whereas the Regional Real Revenue (RNR) has a negative influence on Capital Buying in the District/Province town of Aceh in 2017-2020.

Keywords: *Regional Real Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Profit Fund (DBH), Capital Purchases*

PENDAHULUAN

Semenjak pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sampai saat ini, daerah otonom baru di Indonesia berjumlah 539, yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) provinsi, 412 (empat ratus dua belas) kabupaten, dan 93 (sembilan puluh tiga) kota, tidak termasuk 5 (lima) kota administratif dan 1 (satu) kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta [1] Irfansyah (2016). Badan Pusat Statistik Tahun 2020 juga menjelaskan bahwa berkembangnya jumlah pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun

masyarakat. Menurut [2] Widiasmara (2019) belanja modal dapat berupa pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi sehingga mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, permasalahan yang terjadi dalam belanja modal Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Aceh selama periode 2017-2020 tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Belanja Modal			
		2017	2018	2019	2020
1.	Simeulue	432,81	134,08	202,99	180,12
2.	Aceh Singkil	279,30	118,18	181,74	198,85
3.	Aceh Selatan	389,95	233,60	265,84	223,28
4.	Aceh Tenggara	364,23	221,50	229,64	137,60
5.	Aceh Timur	412,60	140,37	390,86	272,05
6.	Aceh Tengah	411,26	188,30	278,73	239,03
7.	Aceh Barat	313,21	190,24	263,51	359,23
8.	Aceh Besar	284,53	237,28	285,17	299,99
9.	Pidie	307,26	289,46	304,25	262,39
10.	Bireuen	410,28	193,56	295,40	296,00
11.	Aceh Utara	374,75	247,24	420,69	424,17
12.	Aceh Barat Daya	235,33	390,72	270,58	248,18
13.	Gayo Lues	241,99	189,18	189,67	238,30
14.	Aceh Tamiang	292,20	196,20	242,63	276,94
15.	Nagan Raya	336,68	238,02	293,44	347,59
16.	Aceh Jaya	278,77	133,36	159,31	153,04
17.	Bener Meriah	245,58	166,29	189,88	183,21
18.	Pidie Jaya	234,17	173,33	205,02	208,97
19.	Banda Aceh	227,59	83,31	148,96	224,26
20.	Sabang	129,33	125,32	178,52	182,74
21.	Langsa	333,30	45,41	198,59	179,56
22.	Lhokseumawe	223,59	122,01	203,88	208,67
23.	Subulussalam	267,09	98,88	182,34	217,14
	Jumlah	6,836,80	4,155,84	5,581,62	5,561,35

Berdasarkan tabel 1 di atas untuk daerah kota, belanja modal Pemerintah Kota Langsa merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai 333,30 miliar rupiah pada tahun 2017. Akan tetapi belanja modal yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Langsa semakin menurun drastis menjadi hanya 45,41 miliar rupiah pada tahun 2018. Sedangkan belanja modal Pemerintah Kota Sabang merupakan yang terendah, yaitu 129,33 miliar rupiah pada tahun 2017 dan diperkirakan menjadi 125,32 miliar rupiah pada tahun 2018. Rata-rata realisasi keseluruhan belanja modal kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017.

Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah juga penting untuk diperhatikan. Jika terjadi hal yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran maka ini akan mengakibatkan rendahnya realisasi dalam belanja modal. Pengalokasian belanja modal yang tepat sasaran akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi, sehingga perlunya penggunaan dan

pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah yang baik oleh pemerintah daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga peningkatan akan pelayanan masyarakat diharapkan dapat terwujud [3] (Damanik, 2021).

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota dengan 4 tahun periode data penelitian mulai dari tahun 2017 hingga 2020. Teknik sampling yang digunakan oleh penulis dalam penelitian teknik sensus dimana anggota populasi dijadikan sampel [4] sugiyono (2020). Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang merupakan data yang dikumpulkan melalui web, orang atau lewat dokumen. Untuk mengetahui pengaruh digunakan analisis regresi linier berganda, rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

X_4 = Dana Bagi Hasil (DBH)

ε = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang diuji meliputi Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3) dan Dana Bagi Hasil (X_4) serta Belanja Modal (Y). Pada tabel 2 di bawah ini dapat dilihat hasil statistik deskriptif :

Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (X ₁)	92	16.88	358.70	125.6657	75.47307
DAU (X ₂)	92	345.34	998.73	560.7799	154.46274
DAK (X ₃)	92	.00	446.15	175.9752	77.85554
DBH (X ₄)	92	9.17	217.40	29.5843	32.94372
Belanja Modal (Y)	92	83.31	432.81	246.3759	83.06265
Valid (listwise)	N 92				

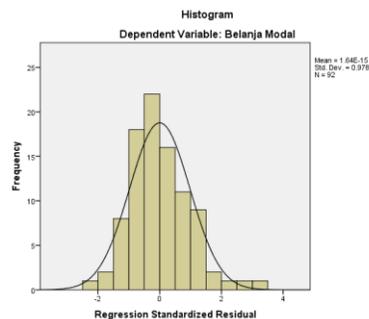
1. Untuk variabel belanja modal, diperoleh nilai terendah sebesar 83.31 yang dialami oleh Kota Banda Aceh pada tahun 2018. Kemudian nilai yang tertinggi dari belanja modal adalah sebesar 432.81 yang dialami oleh Kabupaten Simeulue pada tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebesar 246.3759. Nilai *standar deviation* sebesar 83.06265.
2. Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperoleh nilai minimum sebesar 16.88 yang dialami oleh Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017. Kemudian nilai yang makimum dari PAD adalah sebesar 358.70 yang dialami oleh Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2018. Nilai rata-rata (*mean*) PAD pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebesar 125.6657. Nilai *standar deviation* sebesar 75.47307.
3. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), diperoleh nilai minimum sebesar 345.34 yang dialami oleh Kota Subulussalam pada tahun 2018. Kemudian nilai yang makimum DAU adalah sebesar 998.73 yang dialami oleh Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) DAU pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebesar 560.7799. Nilai *standar deviation* sebesar 154.46274.
4. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), diperoleh nilai terendah sebesar 0.00 yang dialami oleh Kota Langsa pada tahun 2018. Kemudian nilai yang tertinggi DAK adalah sebesar 446.15 yang dialami oleh Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) DAK pada

Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebesar 175.9752. Nilai *standar deviation* sebesar 77.85554.

5. Untuk variabel independen keempat yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 9.17 yang dialami oleh Kota Sabang pada tahun 2019. Kemudian nilai yang makimum (tertinggi) DBH adalah sebesar 217.40 yang dialami oleh Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebesar 29.5843. Nilai *standar deviation* sebesar 32.94372

Hasil Uji Normalitas

Data yang normal ditandai dengan sebaran titik-titik data diseputar garis diagonal. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Dari hasil dapat dijelaskan grafik histogram tidak menceng baik ke kiri maupun ke kanan sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas, dapta diliahat sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Multikolineeritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 PAD (X ₁)	.376	2.658
DAU (X ₂)	.197	5.078

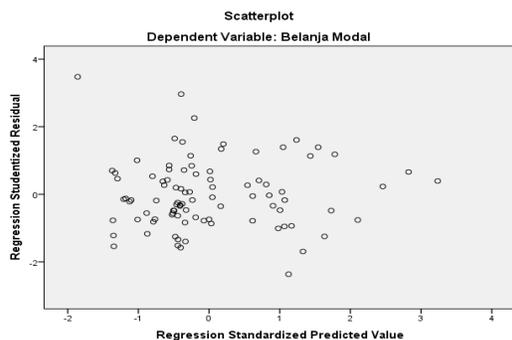
DAK (X ₃)	.311	3.214
DBH (X ₄)	.794	1.259

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut [5] Ghazali (2018:137) uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dapat dihasil sebagai berikut:



Gambar 2 Grafik Scatterplot

Dari Gambar 2 uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Menurut [5] Ghazali (2018:11) uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu dengan periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya).

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.567 ^a	.322	.291	69.96131	1.487

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan table 4 di atas nilai dw yakni sebesar 1,487. Nilai dw akan dibandingkan dengan nilai du yang diperoleh dari tabel *Durbin-Watson* (lampiran). Jumlah sampel (n) = 92 dan variabel independen (k) = 4 dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka diperoleh nilai du sebesar 1,7984. Berdasarkan hasil tersebut maka $du < dw < 4 - du$ yakni $1,7523 < 1,487 < 2,513$ sehingga tidak dapat diambil kesimpulan apakah terjadi autokorelasi atau tidak dalam penelitian. Hasil uji *Durbin-Watson* tidak dapat menunjukkan kesimpulan, sehingga peneliti melakukan pengujian autokorelasi dengan menggunakan metode *The Cochrane-Orcutt two-step Procedure* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

(*The Cochrane-Orcutt two-step Procedure*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.552 ^a	.304	.272	64.56243	1.919

a. Predictors: (Constant), Lag_X4, Lag_X3, Lag_X1, Lag_X2

b. Dependent Variable: Lag_Y

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan metode *The Cochrane-Orcutt two-step Procedure* seperti pada tabel 5 di atas diperoleh nilai dw yakni sebesar 1,919. Perolehan nilai dw tersebut maka akan dibandingkan dengan nilai du yang diperoleh dari tabel *Durbin-Watson* (lampiran). Jumlah sampel (n) = 92 dan variabel independen (k) = 4 dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka diperoleh nilai du sebesar 1,7523. Nilai $4-du$ sebesar 2,081. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $du < dw < 4 - du$ yakni $1,7523 < 1,919 < 2,081$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	88.509	32.739		2.703	.008

PAD (X ₁)	-.362	.158	-.329	2.287	.025
DAU (X ₂)	.250	.107	.466	2.341	.022
DAK (X ₃)	.319	.169	.299	1.890	.062
DBH (X ₄)	.229	.250	.091	.917	.361

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diperoleh persamaan umum regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = (88,509) + (-0,362)X_1 + 0,250X_2 + 0,319X_3 + 0,229X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diketahui bahwa:

- Konstanta (α) sama dengan 88,509 artinya jika Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂), Dana Alokasi Khusus (X₃) dan Dana Bagi Hasil (X₄) sama dengan nol, maka belanja modal sama dengan 88,509%.
- Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (X₁) sama dengan -0,362 artinya Pendapatan Asli Daerah (X₁) memberikan kontribusi negatif terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa setiap penurunan Pendapatan Asli Daerah (X₁) satu satuan maka belanja modal (Y) turun sebesar 0,36% dengan asumsi variabel bebas lainnya dari model regresi adalah tetap.
- Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (X₂) sama dengan 0,250, artinya Dana Alokasi Umum (X₂) memberikan kontribusi positif terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi Umum (X₂) satu satuan maka belanja modal (Y) naik sebesar 0,25% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dari model regresi adalah tetap.
- Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (X₃) sama dengan 0,319, artinya Dana Alokasi Khusus (X₃) memberikan kontribusi positif terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi Khusus (X₃) satu satuan maka belanja modal (Y) naik sebesar 0,32% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dari model regresi adalah tetap.

- Koefisien regresi Dana Bagi Hasil (X₄) sama dengan 0,229, artinya Dana Bagi Hasil (X₄) memberikan kontribusi positif terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan Dana Bagi Hasil (X₄) satu satuan maka belanja modal (Y) naik sebesar 0,23% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dari model regresi adalah tetap.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Penelitian ini menggunakan *Adjusted R²* karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan R² yakni dapat naik ataupun turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Hasil pengujian koefisien determinasi (R²) adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.552 ^a	.304	.272	64.56243	1.919

a. Predictors: (Constant), Lag_X4, Lag_X3, Lag_X1, Lag_X2

b. Dependent Variable: Lag_Y

Dilihat dari nilai koefisien determinasi (R²), sebagaimana hasil perhitungan bahwa *Adjusted R Square* dengan nilai yaitu sebesar 0,272 atau 27,2%. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh diberikan oleh variabel independen Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂), Dana Alokasi Khusus (X₃) dan Dana Bagi Hasil (X₄), terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebesar 27,2%. Sedangkan sisanya sebesar 72,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Berikut adalah hasil uji signifikansi simultan (uji F):

Tabel 8 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	202016.772	4	50504.193	10.318	.000 ^b
Residual	425828.938	87	4894.585		
Total	627845.710	91			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai $F = 10,318$ yang akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} yang diperoleh dengan melihat pada tabel F pada lampiran yaitu 2,47. Diketahui nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10,318 > 2,47$) dengan $sig. < 0,05$ ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individual). Variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Berikut adalah hasil pengujian signifikansi parsial (uji t):

Tabel 9 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	88.509	32.739		2.703	.008
PAD	-.362	.158	-.329	2.287	.025
DAU	.250	.107	.466	2.341	.022
DAK	.319	.169	.299	1.890	.062
DBH	.229	.250	.091	.917	.361

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Hasil pengujian pada tabel IV.9 akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada lampiran yang diperoleh berdasarkan nilai df (jumlah amatan (n) – jumlah variabel penelitian (k) = $92 - 4 = 87$) dengan tingkat probabilitas 5%. Nilai t_{tabel} diperoleh sebesar 1,98761 sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai $sig. < 0,05$ ($0,025 > 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel} = -2,287 < 1,97783$, maka kesimpulannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai $sig. < 0,05$ ($0,022 > 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,341 > 1,97783$, maka kesimpulannya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai $sig. < 0,05$ ($0,062 > 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel} = 1,890 < 1,97783$, maka kesimpulannya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai $sig. < 0,05$ ($0,361 > 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel} = 0,917 < 1,97783$, maka kesimpulannya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2017-2020.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2017-2020.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2017-2020.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2017-2020.
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2017-2020.



SARAN

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian mengenai belanja modal dengan menggunakan objek penelitian di luar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sehingga dapat dijadikan perbandingan apakah hasil penelitian ini juga berlaku untuk Kabupaten/ Kota di luar Provinsi Aceh.
2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan variabel independen yang berkaitan dengan belanja modal di luar dari yang digunakan dalam penelitian ini, seperti sisa lebih pembiayaan, kebijakan anggaran belanja modal, luas wilayah, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemandirian daerah, dan variabel-variabel lainnya. Hal ini disebabkan masih terdapat 72,8% faktor lain yang menjelaskan belanja modal diluar dari variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan tambahan informasi dalam mengelola belanja modal sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis. IAIN Surakarta.

- [3] Damanik, Cindy Tania. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi. Program Studi Strata 1. Departemen Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan. (2021).
- [4] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. PT. Alfabeta. (2020).
- [5] Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan, Cetakan IX. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. (2018).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Irfansyah, Muhammad. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan. (2016).
- [2] Wadiasmara. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating*. (2019). *Jurnal Vol. 2 No. 1*.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN